

**PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, SUKU BUNGA, KURS,
PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH DAN *REGULATORY*
QUALITY INDEX TERHADAP PMDN DI INDONESIA (2006:Q1-2021:Q4)**

(Skripsi)

Oleh

**DIAH PERATIWI
1611021059**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, SUKU BUNGA, KURS, PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH DAN *REGULATORY QUALITY INDEX* TERHADAP PMDN DI INDONESIA (2006:Q1-2021:Q4)

Oleh

DIAH PERATIWI

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dari dalam negeri dengan menggunakan modal yang ada di dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDB, suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *regulatory quality index* terhadap PMDN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (SEKI - BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Worldbank, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian ECM (Error Correction Model/ECM), yaitu model yang mencakup penyesuaian untuk melakukan koreksi terhadap ketidakseimbangan yang disebut sebagai model koreksi kesalahan (error correction model) dengan periode penelitian 2006Q1-2021Q4. Hasil penelitian dalam jangka panjang menunjukkan bahwa variabel PDB dan *Regulatory Quality Index* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN. Sementara itu, variabel kurs dan pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan variabel suku bunga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PMDN. Dalam jangka pendek, variabel PDB, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN. Sedangkan variabel bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap PMDN di Indonesia.

Kata Kunci: *PMDN, PDB, Suku Bunga, kurs, ECM.*

ABSTRACT

THE EFFECT OF NATIONAL INCOME, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES, PUBLIC INVESTMENT EXPENDITURE AND REGULATORY QUALITY INDEX ON DOMESTIC INVESTMENT IN INDONESIA (2006:Q1-2021:Q4)

By

DIAH PERATIWI

Domestic Investment (PMDN) can be defined as investment activities to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia carried out by domestic investors using domestic capital. The purpose of this study is to analyze the effect of GDP, interest rates, exchange rates, government investment expenditure and regulatory quality index on domestic investment in Indonesia. This study uses secondary data sourced from the Indonesian Economic and Financial Statistics website, Bank Indonesia (SEKI - BI), Central Bureau of Statistics (BPS), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkeu), Worldbank, Investment Coordinating Board (BKPM). The research method used is the ECM (Error Correction Model / ECM) research method, which is a model that includes adjustments to make corrections to imbalances referred to as the error correction model with the research period 2006:Q1-2021:Q4. The results of the study in the long run show that the GDP and Regulatory Quality Index variables have a positive and significant effect on domestic investment. Meanwhile, the exchange rate variable and government investment expenditure have a positive but insignificant effect, and the interest rate variable has a negative but insignificant effect on domestic investment. In the short term, the variables of GDP, exchange rate, government investment expenditure, and Regulatory Quality Index have a positive and significant effect on domestic investment. Meanwhile, the interest rate variable has a significant negative effect on domestic investment in Indonesia.

Keywords: Domestik investment, GDP, Interest Rate, Exchange Rate, ECM.

**PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, SUKU BUNGA, KURS,
PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH DAN *REGULATORY*
QUALITY INDEX TERHADAP PMDN DI INDONESIA (2006:Q1-2021:Q4)**

Oleh

DIAH PERATIWI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN NASIONAL, SUKU BUNGA, KURS, PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH DAN *REGULATORY QUALITY INDEX* TERHADAP PMDN DI INDONESIA (2006:Q1-2021:Q4)**

Nama Mahasiswa : **Diah Peratiwi**

Nomor Induk Mahasiswa : **1611021059**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Neli Aida, S.E., M.Si
NIP 19631215 198903 2 002

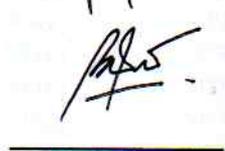
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

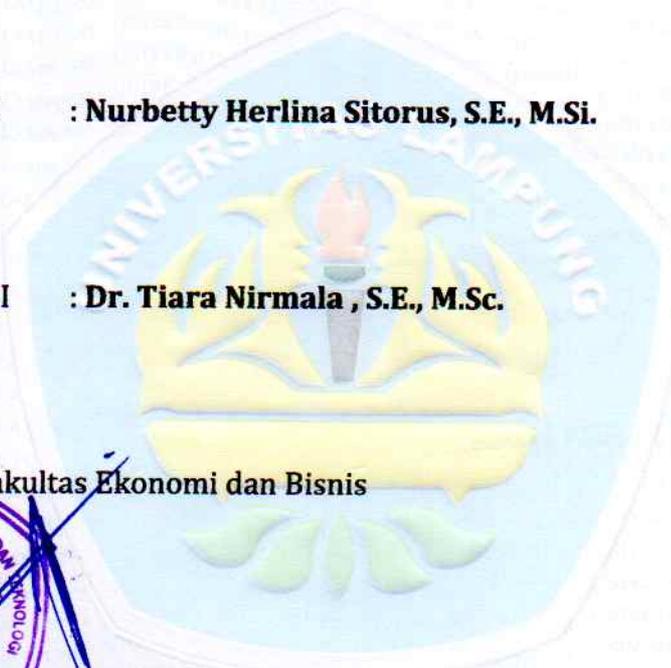
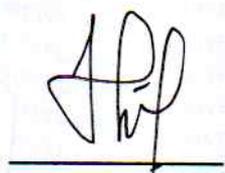
Ketua : Thomas Andrian. P.A., S.E., M.Si.



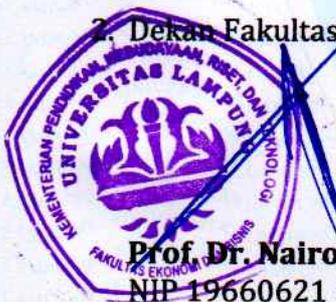
Penguji I : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Mei 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis



DIAH PERATIWI

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Diah Peratiwi lahir pada tanggal 08 Februari 1998 di Waysom, Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penulis lahir sebagai putri pertama dari satu bersaudara pasangan Bapak Edi dan Ibu Rohaida. Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu SD Negeri 1 TEBA diselesaikan pada tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Agung diselesaikan pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan SMA N 1 Kota Agung dan diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2016. Adapun kegiatan organisasi yang pernah diikuti Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai staf Kestari periode 2017/2018, sebagai staf BBQ ROHIS periode 2017/2018 dan staf usaha Koperasi Mahasiswa 2018/2019. Pada tahun 2018 penulis mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Kemudian tahun 2020 penulis menjadi Agen Relawan Pajak di KanWil DJP Bengkulu dan Lampung.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya terbaik ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, terhormat, tersayang, sebagai panutan dalam hidup, yaitu Bapak Edi Suryadi dan Ibu Rohaida terima kasih telah membesarkan dan membimbing dengan penuh kasih sayang, selalu memotivasi dan memberi dukungan moril maupun materi, selalu mendoakan kesuksesan Diah, serta segala bentuk pengorbanan dan semua hal yang telah diberikan kepada Diah yang tidak akan pernah bisa terbalas, semoga Allah selalu melindungi kalian.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan dan sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan karya tulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik”

(Kelly Clarkson)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”

(QS. Yusuf, 12:87)

“Teruslah bergerak maju walaupun ada perpisahan dan kekecewaan. Belajarlah melepaskan dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan”

(Chrisye)

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karna berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Nasional, Suku Bunga, Kurs, Pengeluaran Investasi Pemerintah dan *Regulatory Quality Index* Terhadap PMDN Di Indonesia (2006Q1-2021Q4)” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Thomas Andrian, P.A., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta, memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si selaku Dosen penguji I, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc. selaku Dosen penguji II, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. SSP. Pandjaitan, Pak Muhidin, Ibu Ukhty, Bu Resha, Pak Imam, Pak Yoke, Ibu Lies,

Ibu Irma, Pak Yudha, Ibu Emi, Ibu Marselina, Ibu Tiara, Ibu Ratih, Pak Moneyzar, Ibu Ida, Pak Toto, Pak Wayan, Pak Husaini, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

8. Ibu Yati, Ibu Mimi, dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Edi Suryadi dan Ibu Rohaida yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan mendukung secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Wo, Shifa, Irgi, Ade, Nik, dan Nenek serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat Gultekim; Desi, Dina, Detia, Kartika, dan Anggi. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman, dan sudah memberikan dukungan selama proses perkuliahan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku Nisa, Renita, Kiki, Daimah, Berliana, Cubing, Anis, dan Nabilah. Terima kasih telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabatku Amel, Indah, dan Liza. Terima kasih telah menemani dari SMA dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. Keluarga Jurusan Ekonomi Pembangunan 2016, Cia, Amel, Yana, Rizki, Ridia, Bela, Ida, Indah, Faul dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekompakkan dan kekeluargaannya.
15. Keluarga Dewi Ratih mbak Lisa dan Esa. Terima kasih telah menemani dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Keluarga kuliah kerja nyata (KKN), Riswanto, Hevix, Joshua, Icil, Yolanda, dan Kartika. Terima kasih sudah memberikan pengalaman dan dukungan kepada penulis.
17. Rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu, terima kasih pengalaman dan bantuannya selama perkuliahan.

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca lainnya. Aamiin ya robbal alamin.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Diah Peratiwi

NPM. 1611021059

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	V
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Peneliatian	24
II. TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Teoritis	25
1. Investasi	25
2. Pendapatan Nasional (PDB)	30
3. Suku Bunga.....	31
4. Kurs.....	32
5. Pengeluaran investasi pemerintah.....	33
6. <i>Regulatory Quality Index</i>	35
7. Pengaruh Variabel Bebas dengan PMDN.....	38
B. Tinjauan Empiris	40
C. Kerangka Pemikiran	44

D.	Hipotesis penelitian	46
III.	METODE PENELITIAN	48
A.	Ruang Lingkup Penelitian	48
B.	Jenis dan Sumber Data	48
C.	Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	49
D.	Model dan Metode Penelitian.....	51
1.	Uji Stasioneritas (<i>Unit Root</i>).....	52
2.	Uji kointegrasi.....	53
3.	Error Correction Model (ECM)	54
4.	Pengujian Hipotesis	56
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A.	Hasil Pengujian.....	59
1.	Uji Stasioneritas	59
2.	Uji Kointegrasi.....	60
3.	Estimasi Error Correction Model (ECM) Engle-Granger.....	62
4.	Uji Hipotesis	63
5.	Koefisien Determinasi (R^2)	67
B.	Pembahasan	68
2.	Pengaruh Pendapatan Nasional (PDB) terhadap terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	68
3.	Pengaruh Suku Bunga terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 69	
4.	Pengaruh Kurs Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	70
5.	Pengaruh Pengeluaran Investasi Pemerintah Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri	71

6. Pengaruh <i>Regulatory Quality Index</i> Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri	72
C. Implikasi Penelitian	73
V. SIMPULAN DAN SARAN	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data PMA dan PMDN tahun 2006 - 2021	6
Tabel 2. Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan 1 Tahun 2006 - Triwulan 4 Tahun 2021.....	16
Tabel 3. Ringkasan hasil penelitian Rio, Junaidi, dan Candra Mustika.....	40
Tabel 4. Ringkasan hasil penelitian Rasmene Oudraogo, Hamidou Sawadago, R.....	41
Tabel 5. Ringkasan hasil penelitian Ibrahim M. Awad, Ghada K. Al-Jerashi, dan Zaid Ahmad Alabaddi	42
Tabel 6. Ringkasan hasil penelitian Chimere Okechukwu Lheonu	42
Tabel 7. Ringkasan hasil penelitian Thomas Galih Pramudita, Setyabudi Indartono, Maimun Sholeh	43
Tabel 8. Ringkasan hasil penelitian Aamer Sohn, Umer Rehman, dan Muhammad Azeem	44
Tabel 9. Variabel Penelitian.....	49
Tabel 10. Hasil <i>Unit Root Test</i> pada Level	59
Tabel 11. Hasil <i>Unit Root Test</i> pada <i>First Difference</i>	60
Tabel 12. Hasil Estimasi Jangka Panjang	61
Tabel 13. Hasil Uji Kointegrasi <i>Engle-Granger</i>	61
Tabel 14. Hasil Estimasi ECM Jangka Pendek.....	62
Tabel 15. Hasil Uji t-statistik Pada Persamaan Jangka Panjang	63
Tabel 16. Hasil Uji t-statistik Pada Persamaan Jangka Pendek	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	8
Gambar 2. Perkembangan Pendapatan Nasional dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2006:Q1-2021:Q4	10
Gambar 3. Perkembangan suku bunga dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2006:Q1-2021:Q4	12
Gambar 4. Perkembangan kurs dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2006:Q1-2021:Q4	15
Gambar 5. Perkembangan <i>Regulatory Quality index</i> Indonesia periode 2006:Q1-2021:Q4.....	19
Gambar 6. Perkembangan pengeluaran investasi pemerintah pusat periode 2006:Q1-2021:Q4.....	22
Gambar 7. Kerangka Pemikiran.....	46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan. Tujuan pembangunan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai kestabilan perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai cara diantaranya dengan menggerak dan mendorong pertumbuhan di semua sektor industri yang ada. Sehingga kegiatan-kegiatan produksi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang mampu meningkatkan permintaan di pasar. Terjadinya perkembangan pasar menunjukkan bahwa volume kegiatan produksi juga mengalami perkembangan, yang akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, selain untuk konsumsi dan pengeluaran pemerintah, investasi dalam negeri merupakan komponen penting bagi pendapatan nasional (Siwu, 2019).

Dalam mempercepat pembangunan nasional di segala bidang, pemerintah memerlukan modal yang besar. Akan tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal untuk keperluan mempercepat pembangunan terbatas. Oleh karena itu sebagai salah satu aspek dalam kebijakan, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha agar memperoleh lebih banyak dana (modal) untuk pembangunan (Amiruddin et al., 2003).

Investasi merupakan salah satu komponen penting dari permintaan agregat yang merupakan faktor krusial bagi suatu proses pembangunan (*sustainable development*). Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keterbatasan dana untuk mencukupi upaya pembangunan ekonomi negara. Jika dilihat dari kondisi Indonesia yang

sedemikian rupa, maka peningkatan modal untuk meningkatkan perekonomian sangat berperan penting. Oleh karena itu pemerintah dan swasta berupaya menghimpun dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan investasi, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Eva, 2018) .

Investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut UU ini, yang dimaksud dengan penanaman modal atau investasi ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal. Adapun penanam modal atau investor yang dimaksud disini bisa berupa investor dalam atau luar negeri. Pada pasal 1 ayat 2 dan 3 pada UU tersebut menjelaskan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penanaman modal yang ditujukan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri dan dilakukan oleh investor lokal. Sedangkan penanaman modal luar negeri adalah penanaman modal yang ditujukan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri dan dilakukan oleh investor asing, penanaman modal ini dilakukan sepenuhnya oleh orang asing.

Pembentukan modal (investasi) akan menambah produksi barang dan jasa bukan hanya dalam satu periode tetapi berlanjut kepada periode berikutnya. Menurut Harrod-Domar pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga permintaan efektif masyarakat. Jika pada suatu periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan barang dan jasa (Arsyad Lincoln, 2010).

Dengan adanya modal investasi, maka membuat pembangunan menjadi lebih baik, kendati dengan jumlah penduduk yang meningkat. Karena dengan laju pembentukan modal yang cepat dan besar, lambat laun akan mampu mengurangi kebutuhan akan modal asing. Namun demikian, di negara berkembang bahkan terbelakang dengan

tingkat penduduk yang besar, umumnya rasio investasi dengan jumlah penduduk masih sangat kecil. Dampaknya, sekalipun tabungan meningkat dengan pesat, tetap saja tidak cukup untuk investasi. Akibatnya adalah negara tetap harus mengundang investasi asing yang belum tentu menguntungkan negaranya (Prasetyo, 2010)

PMA belum mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang karena pemerintah Indonesia memprioritaskan sektor strategis untuk dikelola dengan menggunakan PMDN. Hal ini diperkuat dengan kemampuan PMDN dalam meningkatkan perekonomian. Pemerintah perlu untuk mempertahankan PMDN dibandingkan PMA untuk meningkatkan perekonomian di setiap provinsi sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih merata. Namun penerapan modal asing juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam upaya penghimpunan dana untuk pembangunan. *Capital inflows* atau arus modal asing berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu karena kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Selain sebagai perpindahan modal, modal asing juga mampu memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. Akan tetapi apabila modal asing tersebut tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, terutama apabila terjadinya *capital flows reversal* (Imamudin, 2010).

Salah satu syarat dasar dalam pembangunan adalah atas dasar kekuatan diri sendiri. Pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri untuk menjadi lebih maju harus muncul dari warga negaranya sendiri. Kekuatan luar hanya merangsang dan membantu, dan tidak untuk mengganti dan cenderung memanfaatkan modalnya kearah sumber-sumber alam untuk pasar dunia, dan belum tentu menguntungkan masyarakat negara setempat (Lewis, 1954). Pembangunan tidak akan mungkin jika tidak berkenan dihati rakyat. Terlalu banyak tergantung pada bantuan luar negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk mengurus sumber daya alam demi keuntungan mereka saja

(Cairncross, 1979). Bantuan seperti itu sama halnya dengan mengajak rakyat negara terbelakang untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka (Paul Baran, 1957).

Agar investasi di Indonesia tidak dikuasai oleh investasi asing maka salah satu cara yang ditempuh yaitu melalui pemberdayaan investasi dalam negeri. Karena investasi dalam negeri merupakan faktor yang krusial bagi suatu proses pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam negeri juga merupakan komponen yang penting dalam menyumbang pendapatan nasional (Nola, 2019).

(Kuncoro, 2003) menyebutkan “Hipotesis utama teori ketergantungan adalah (a) PMA dan bantuan luar negeri dalam jangka pendek memperbesar pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang (5-20 tahun) menghambat pertumbuhan ekonomi, (b) makin banyak negara bergantung pada PMA dan bantuan luar negeri makin besar perbedaan penghasilan. Oleh karena itu, pemberdayaan PMDN merupakan hal yang lebih penting untuk dilakukan”. PMA juga dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan nasional dalam membantu pembangunan ekonomi negara jika tidak ada regulasi yang tegas dari pemerintah. Kendala tersebut berasal dari PMA sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberdayakan investasi dalam negeri sebagai salah satu sumber pendapatan dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Meskipun situasi perekonomian Indonesia saat ini telah menunjukkan arah yang positif, pertumbuhan investasi dalam negeri belum menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Ini masalah bagi Indonesia yang saat ini lebih fokus pada pertumbuhan industri nasional (Pramuditha et al., 2019). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dari dalam negeri dengan menggunakan modal yang ada di dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri yakni perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa tingkat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara keseluruhan memiliki tren meningkat dari tahun ketahun, namun jika kita bandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) nilai investasi PMDN masih lebih rendah dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA), kendati pemerintah sudah banyak mengupayakan peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri, seperti pemerintah mempermudah izin-izin yang dibutuhkan oleh investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melakukan reformasi birokrasi guna memangkas birokrasi yang tidak perlu. Pemerintah juga menyederhanakan regulasi yang berhubungan dengan investasi untuk mempermudah investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokrasi. Selain dua hal diatas, pemerintah juga memberikan fasilitas pajak kepada investor yang menanamkan modalnya di dalam negeri, beberapa fasilitas pajak yang diberikan antara lain pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk, dan lain sebagainya. Dalam penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa PMDN lebih stabil dan dapat memberikan dampak yang dampak pada perekonomian dalam jangka panjang. Seperti pada penelitian (Ibrahim & Wahab, 2019), dan penelitian (Sulistyanto & Lidiyawati, 2021).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat akan memberikan banyak manfaat bagi perekonomian suatu negara diantaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, dengan meningkatnya Penanaman Modal Dalam Negeri, negara akan semakin mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada investasi asing, hal ini dapat memperkuat posisi negara dalam persaingan global. Ketiga, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meningkat dapat menciptakan lapangan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Disisi lain Penanaman Modal Dalam Negeri yang menurun

akan menyebabkan beberapa masalah yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya jika Penanaman Modal Dalam Negeri menurun, maka negara akan semakin tergantung pada investasi asing, yang dapat menyebabkan kerentanan ekonomi dan kebijakan luar negeri yang tidak mandiri. Sehingga penting bagi suatu negara untuk mendorong Penanaman Modal Dalam Negeri agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian negara dan meningkatkan kemandirian ekonominya. Oleh karena itu, penting mengangkat topik penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 1. Data PMA dan PMDN tahun 2006 - 2021

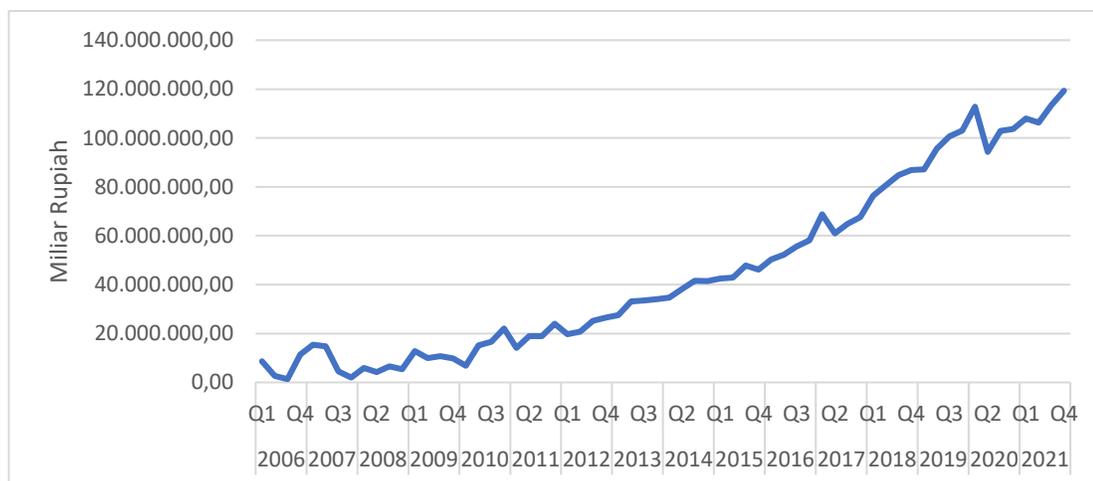
Tahun	PMA (US\$. Ribu)	PMDN (Rp. Juta)
2006	6,063,886.30	23,996,911.50
2007	10,409,083.80	36,666,761.70
2008	17,561,060.40	22,093,507.50
2009	12,574,517.20	43,348,627.30
2010	16,214,772.30	60,626,307.90
2011	19,474,531.50	76,000,694.30
2012	24,564,670.20	92,182,014.40
2013	28,616,269.70	128,162,654.30
2014	28,529,698.50	156,126,157.00
2015	29,275,940.80	179,465,867.20
2016	28,964,074.80	216,230,848.10
2017	32,239,751.80	262,350,546.90
2018	29,307,907.70	328,604,916.40
2019	28,208,760.70	386,498,388.90
2020	28,666,272.20	413,535,523.50
2021	28,666,272.20	447,063,646.40
2022	45,604,963.20	552,768,972.10

Sumber: *Nasional Single Windows for Investment* - Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami tren meningkat. Namun apabila dibandingkan dengan penanaman modal asing (PMA) maka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih jauh tertinggal. Pada tahun

2006 sampai tahun 2007 sebelum terjadinya krisis global tren Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat dari Rp. 23,996,911 juta menjadi Rp. 36,666,761, kemudian turun menjadi Rp. 22,093,507 pada tahun 2008. Hal ini terjadi akibat krisis global pada tahun 2008 berdampak pada ketidakpastian ekonomi global dan meredanya permintaan pasar global yang menyebabkan investor merasa ragu dan enggan untuk menanamkan investasinya di dalam negeri. Selain itu tahun 2008 Indonesia juga mengalami beberapa peristiwa politik yang tidak stabil, seperti kasus *Century* dan pemilihan presiden. Hal ini dapat memicu ketidakpastian dikalangan investor, sehingga berdampak pada menurunnya minat investor dalam menanamkan modalnya. Namun pada tahun 2009 Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat kembali sampai pada tahun 2022. Pada tahun 2009 pasca krisis global, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan hal ini terjadi karena pemerintah mengimplementasikan paket stimulus ekonomi dengan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk import bagi sejumlah usaha, seperti industri manufaktur dan sektor properti. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana stimulant untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga acuan sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat pertumbuhan kredit bagi pelaku usaha. Disisi lain pemerintah juga mendorong investasi dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta mengoptimalkan program-program yang mendukung investasi seperti program *tax holiday*. Kemudian pada tahun 2020, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada ekonomi global dan nasional, termasuk pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia. Pada awal pandemi, PMDN mengalami penurunan akibat ketidakpastian ekonomi dan bisnis yang diakibatkan oleh pandemi. Namun setelah triwulan kedua pada tahun 2020 mengalami pemulihan dan meningkat. Terdapat perubahan tren sektor investasi dimana, sektor-sektor yang terdampak pandemik seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi mengalami penurunan nilai investasi, sedangkan sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti pangan, air minum, dan energi mengalami peningkatan, begitu juga di sektor kesehatan, termasuk alat kesehatan dan layanan kesehatan mengalami peningkatan.

Berdasarkan perbandingan data PMDN dan PMA dapat kita lihat tingkat ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing. Terlalu tingginya ketergantungan pada investasi PMA dapat memiliki risiko, seperti kerentanan terhadap fluktuasi pasar global atau pengaruh eksternal yang lebih besar terhadap perekonomian dalam negeri. dalam hal ini, maka perlu dipertimbangkan upaya untuk mendorong investasi PMDN dan mengembangkan modal domestik. Selain itu PMDN merupakan indikator penting dalam perekonomian suatu negara dimana menunjukkan tingkat investasi yang dilakukan oleh investor di dalam negeri, tingkat PMDN yang tinggi menunjukkan adanya kepercayaan investor dalam perekonomian negara. Peningkatan PMDN biasanya dianggap sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri suatu negara.



Sumber. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Gambar 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia. Pada tahun 2006 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dari triwulan pertama sampai ke empat. Hal ini ditandai dengan memburuknya kondisi ekonomi yang disertai dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan kurs yang cenderung tidak stabil menyebabkan investasi di Indonesia menjadi kurang menarik dibandingkan negara lainnya. Pada tahun 2007:Q1 mengalami kenaikan dengan ditandai tingkat suku bunga yang cenderung turun yaitu sebesar 9%

dibanding kuartal sebelumnya yaitu sebesar 9.75%. Namun pada tahun 2007:Q2 – 2008:Q4 mengalami penurunan kembali akibat dari terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Pada tahun 2009 juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mengalami fluktuasi akibat pasca krisis global.

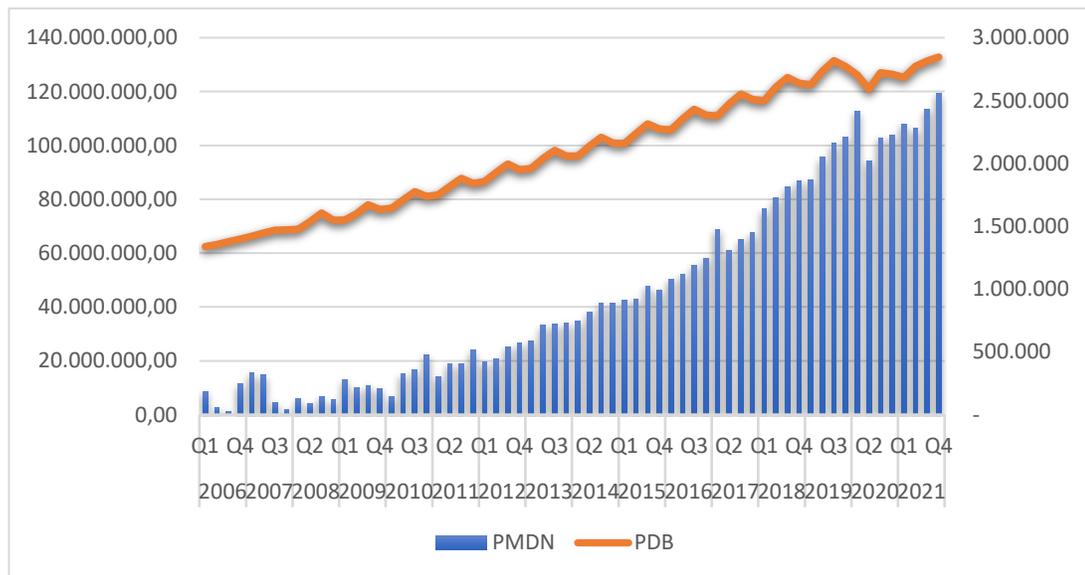
Pada tahun 2013 kegiatan investasi meningkat hal ini ditandai dengan impor barang modal, bahan baku yang cukup tinggi. Namun karena pada tahun 2013 investasi pemerintah dibiayai dengan defisit anggaran maka akan bersifat mendesak (*crowding out*) investasi swasta melalui kebijakan suku bunga tinggi sebesar 7,50% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,50%.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2021 PMDN mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada tahun 2016 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp216,230,848 Miliar. Dan meningkat menjadi Rp328,604,916.40 miliar. Hingga pada tahun 2021 mencapai Rp 447,063,412.40 miliar. Peningkatan realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan meningkatnya kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-lembaga pemeringkat utang. Tingginya gejolak dalam penanaman modal pada rasio investor dalam negeri merupakan penyebab terjadinya kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri dari tahun ke tahun (BKPM, 2019).

Pendapatan nasional suatu negara dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ketika terjadi peningkatan pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula tingkat konsumsi masyarakat, sehingga kebutuhan akan barang dan jasa juga meningkat, begitupun sebaliknya. Hal ini didasarkan pada teori Keynesian yang menyatakan bahwa, tingkat pendapatan nasional menentukan tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Jika pendapatan nasional meningkat, maka pengeluaran agregat juga akan meningkat. Dalam konteks ini investasi dianggap sebagai salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, semakin

besar pula investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak pula uang yang tersedia untuk diinvestasikan.

Konsep alur pendapatan nasional dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Keynesian dapat menjelaskan Pengaruh pendapatan nasional. Keynes berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula investasi yang dilakukan para pengusaha. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang yang tersedia untuk diinvestasikan.



Sumber: Bank Indonesia dan BKPM

Gambar 2. Perkembangan Pendapatan Nasional dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2006:Q1-2021:Q4

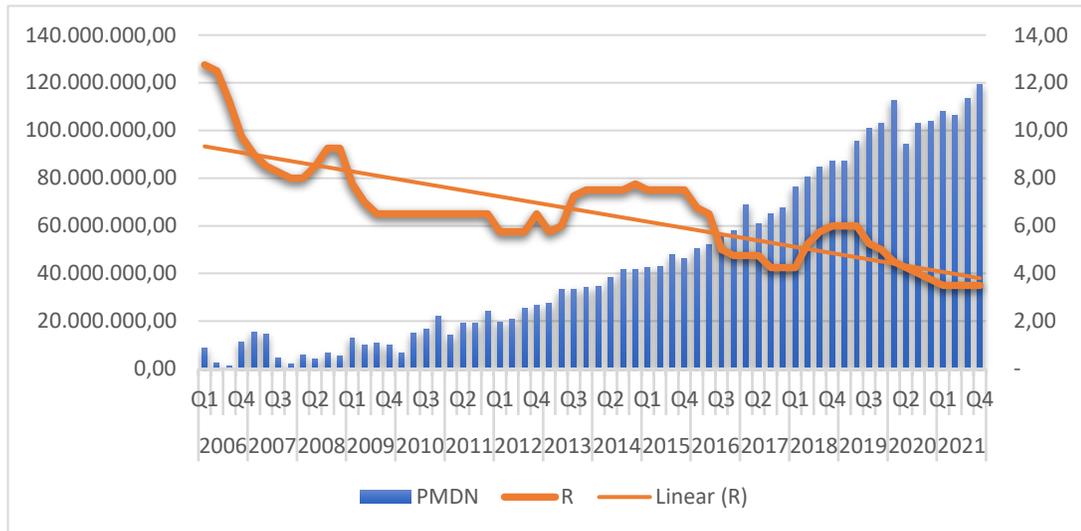
Pada gambar diatas menunjukkan perkembangan pendapatan nasional (PDB) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia pada periode 2006:Q1-2021:Q4. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan nasional dan Penanaman Modal Dalam Negeri berhubungan positif, hal ini dapat kita lihat pada gambar diatas, yang secara keseluruhan memperlihatkan ketika pendapatan nasional

meningkat maka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Contohnya pada tahun 2006 Q3 pendapatan nasional berdasarkan data diatas sebesar 1.376.302 miliar naik menjadi 1.398.245 miliar sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri pada saat yang sama sebesar 1.338.071 miliar naik menjadi 11.358.594 miliar begitu pula pada tahun 2007 Q1 pendapatan nasional naik menjadi 1.420.986 sedangkan penanaman modal naik menjadi 15.411.312 miliar. Hal ini karena peningkatan pendapatan nasional yang berupa peningktn output agregat akan mempengaruhi fungsi investasi agregat. Karena semakin cepat laju pertumbuhan agregat akan semakin besar pula permintaan untuk melakukan investasi (Wahyuni, 2004).

Penelitian yang mendukung bahwa pendapatan nasional berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Afonso et al., 2019), yang menyatakan bahwa pendapatan nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Portugal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional dapat meningkatkan permintaan domestik dan mendorong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Faghieh & Akbari, 2019), pendapatan nasional memiliki pengaruh positif terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri.

Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar untuk meminjam uang dari lembaga keuangan atau bank. Alur suku bunga mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu ketika suku bunga lebih tinggi maka biaya pinjaman akan lebih tinggi. Hal ini dapat membuat investor enggan untuk meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan dan kemudian menginvestasikannya dalam usaha mereka. Akibatnya, Penanaman Modal Dalam Negeri dapat menurun. Sedangkan suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong investor untuk mengambil pinjaman usaha dan memperbesar modal usaha mereka. Ini dapat meningkatkan produksi dan penjualan dan dapat memperkuat ekonomi nasional.

Dasar teori yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi investasi yaitu teori perpotongan Keynesian. Semakin rendah suku bunga, semakin murah biaya modal, dan semakin tinggi kemungkinan investasi.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3. Perkembangan suku bunga dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2006:Q1-2021:Q4

Suku bunga merupakan salah satu variabel yang berpengaruh pada tumbuhnya investasi dalam hal ini Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia. Jika suku bunga dari suatu negara mengalami kenaikan, maka hal ini akan berdampak pada melesunya perekonomian sehingga akan menurunkan investasi (PMDN). Sebaliknya ketika tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka perekonomian akan menguat sehingga investasi (PMDN) juga akan meningkat (Samuel et al., 2019).

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti (misalnya setahun lagi) (Boediono, 2013). Menurut beberapa pakar ekonomi berkaitan dengan teori investasi menjelaskan hubungan erat antara investasi dan suku bunga. Teori investasi dari Keynes (Nanga, 2005) menjelaskan bahwa apabila suku bunga turun akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dan sebaliknya akan berlaku jika suku bunga mengalami

kenaikan. Hal ini karena investor akan mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan ketika lembaga keuangan menaikkan suku bunga, maka akan berpengaruh pada hampir semua pinjaman perusahaan dan konsumen dalam suatu perekonomian.

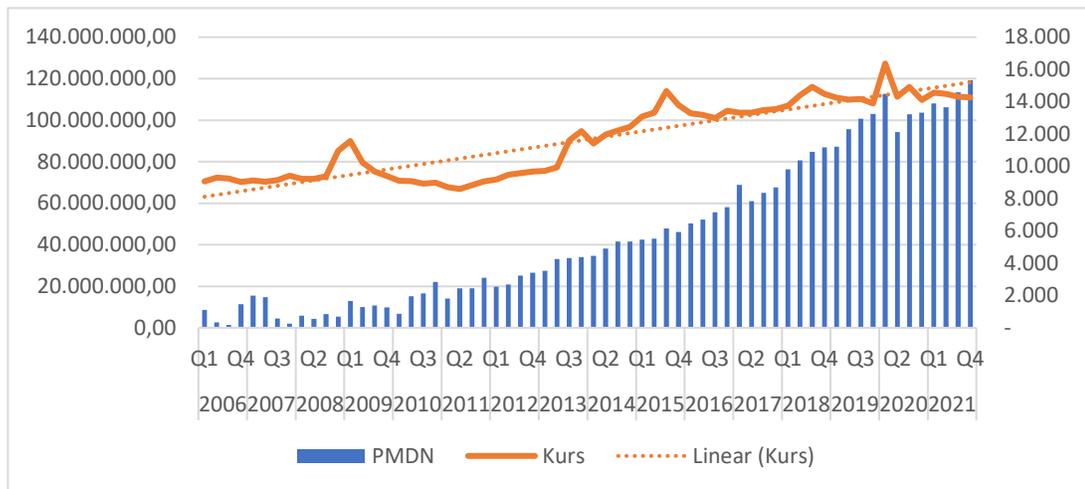
Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi (Sukirno, 2005).

Dari gambar diatas dapat jelaskan secara keseluruhan ketika suku bunga naik maka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan turun. Contohnya ketika suku bunga pada tahun 2016 Q1 sebesar 6,75% turun menjadi 6,50% pada Q2 ini artinya adanya penurunan biaya modal dalam investasi, maka investor seharusnya akan tertarik melaksanakan rencana investasi atau proyeknya, sehingga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seharusnya meningkat, seperti pada tahun 2016 Q1 sebesar 50.351.709 miliar menjadi 52.191.558 miliar, begitu pula pada kuartal berikutnya suku bunga sebesar 5% turun menjadi 4,75% sedangkan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 55.580.001 miliar menjadi 58.107.579 miliar. Begitu pula pada tahun 2017 Q1 dimana suku bunga sebesar 4,75% dan pada kuartal berikutnya suku bunga masih sama sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2017 Q1 sebesar 68.764.815 miliar menjadi 61.005.362 miliar. Sedangkan pada Q3 dan Q4 suku bunga sebesar 4,75% dan 4,25% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 64.933.777 miliar menjadi 67.646.591 miliar.

Penelitian yang mendukung bahwa suku bunga berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Park et al., 2019), bahwa suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga dapat menurunkan permintaan terhadap kredit dan mempengaruhi keputusan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Kurs suatu negara dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri melalui harga dan barang jasa impor dan ekspor, karena kurs yang rendah dapat membuat harga barang dan jasa dari suatu negeri menjadi lebih murah dibanding harga barang dan jasa dari negara lain, sehingga meningkatkan permintaan dan produksi domestik. Pergerakan nilai kurs yang signifikan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri dan keputusan investasi dari investor domestik.

Konsep ekonomi yang membahas hubungan kurs dengan investasi yaitu efek pengurangan belanja (*Expenditure reducing effect*) (Boediono, 2002). Ketika kurs meningkat maka biaya impor barang dan jasa menjadi lebih mahal, sementara harga ekspor menjadi lebih murah bagi negara lain. Hal ini akan berdampak pada daya saing produk-produk dalam negeri di pasar internasional. Peningkatan daya saing dapat meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan yang bergantung pada ekspor. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin akan meningkatkan investasi dalam pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, atau ekspansi bisnis lainnya. Selain itu peningkatan kurs juga dapat mempengaruhi sektor investasi melalui penurunan daya beli dalam negeri. ketika kurs turun, harga barang impor menjadi lebih murah. Ini dapat menyebabkan konsumen cenderung lebih memilih barang impor daripada barang produksi dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan domestik terhadap produk-produk dalam negeri. Akibatnya perusahaan-perusahaan mungkin mengalami penurunan penjualan dan pendapatan, yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan investasi.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4. Perkembangan kurs dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode 2006:Q1-2021:Q4

Gambar diatas merupakan perkembangan kurs yang fluktuatif dari periode 2006:Q1-2021:Q4 namun secara keseluruhan meningkat, begitu pula dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 kurs rupiah melemah, hal ini didorong oleh faktor global terkait perkembangan di AS yakni menguatnya rencana normalisasi kebijakan moneter *The Fed*. Kondisi tersebut memicu pelemahan mata uang negara kawasan dan negara berkembang lainnya, termasuk rupiah (Bank Indonesia, 2017). Hal ini memiliki pengaruhnya dengan produk produk yang diekspor. Contohnya pada tahun 2013 Q1 ketika kurs sebesar Rp 9.719, dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 27.497.548 miliar, sedangkan pada Q2 kurs menjadi terdepresiasi ke nilai Rp 9.929 sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat menjadi 33.127.979 miliar. Hal ini karena ketika melemahnya nilai kurs, maka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung meningkat karena memungkinkan untuk meningkatkan ekspor dan memicu investasi di sektor-sektor yang terkait dengan ekspor.

Tabel 2. Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan 1 Tahun 2006 - Triwulan 4 Tahun 2021

PMDN

	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	16,544	417,408,965.7
Industri Makanan	27,539	317,361,216.0
Listrik, Gas dan Air	9,793	308,928,968.1
Konstruksi	27,803	298,007,065.9
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	18,956	255,266,792.1
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	15,631	223,032,860.8
Industri Kimia Dan Farmasi	10,786	177,237,997.1
Pertambangan	7,132	175,460,985.1
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6,733	106,268,542.5
Industri Mineral Non Logam	4,199	103,784,647.2
Jasa Lainnya	42,306	91,871,208.2
Industri Kertas dan Percetakan	5,152	86,627,341.9
Perdagangan dan Reparasi	150,781	79,347,226.8
Hotel dan Restoran	23,117	69,452,227.5
Industri Karet dan Plastik	8,404	44,758,751.4
Industri Tekstil	6,270	36,530,240.8
Kehutanan	1,191	21,591,856.6
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2,590	17,930,894.5
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	4,224	14,811,563.9
Industri Kayu	4,001	14,613,280.3
Industri Lainnya	4,994	8,244,658.6
Perikanan	1,642	2,292,019.0
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	884	2,124,063.3
Total	400,67	2,872,953,373.3

Sumber: *Nasional Single Windows for Investment* - Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan lima sektor dengan nilai investasi tertinggi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dari tahun 2006 sampai tahun 2021 diantaranya, pertama sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, sektor kedua yaitu industri makanan, sektor ketiga listrik gas dan air, sektor keempat konstruksi dan sektor kelima tanaman pangan, perkebunan, perternakan. Kelompok tanaman pangan dan perkebunan terdiri dari kopi, teh, rempah-rempah, karet alam, biji coklat, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan (BPS (Badan Pusat Statistik), 2012). Tiga dari sepuluh produk unggulan ekspor

Indonesia merupakan kelompok tanaman pangan perkebunan diantaranya kopi, biji coklat, dan karet. Sedangkan pada sektor listrik, gudang dan telekomunikasi Indonesia mengimpor barang modal terutama mesin, peralatan mekanis, dan reaktor nuklir. Sehingga kurs perlu dipertimbangkan dalam mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Hubungan kurs dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) positif, sesuai dengan efek pengurangan belanja (*Expenditure reducing effect*) (Boediono, 2002) , Ketika kurs meningkat maka biaya impor barang dan jasa menjadi lebih mahal, sementara harga ekspor menjadi lebih murah bagi negara lain. Hal ini akan berdampak pada daya saing produk-produk dalam negeri di pasar internasional. Peningkatan daya saing dapat meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan yang bergantung pada ekspor. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin akan meningkatkan investasi dalam pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, atau ekspansi bisnis lainnya. Selain itu peningkatan kurs juga dapat mempengaruhi sektor investasi melalui penurunan daya beli dalam negeri. Ketika kurs turun, harga barang impor menjadi lebih murah. Ini dapat menyebabkan konsumen cenderung lebih memilih barang impor daripada barang produksi dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan domestik terhadap produk-produk dalam negeri. Akibatnya perusahaan-perusahaan mungkin mengalami penurunan penjualan dan pendapatan, yang dapat mengurangi insentif untuk melakukan investasi. Selain itu kurs juga menggambarkan kondisi fiskal dan moneter, karena kurs yang kuat dan stabil biasanya mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kondisi fiskal dan moneter yang baik dan dapat menjaga stabilitas ekonomi.

Hal ini dikuatkan pada penelitian (Canbaloglu & Gurgun, 2017) yang menyatakan bahwa perubahan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap *domestic investment*. Sejalan dengan penelitian tersebut, dalam penelitian (Wahyuni, 2004) kurs memiliki korelasi positif dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penguatan kurs akan mendorong investor dalam negeri menanamkan modalnya dalam negeri.

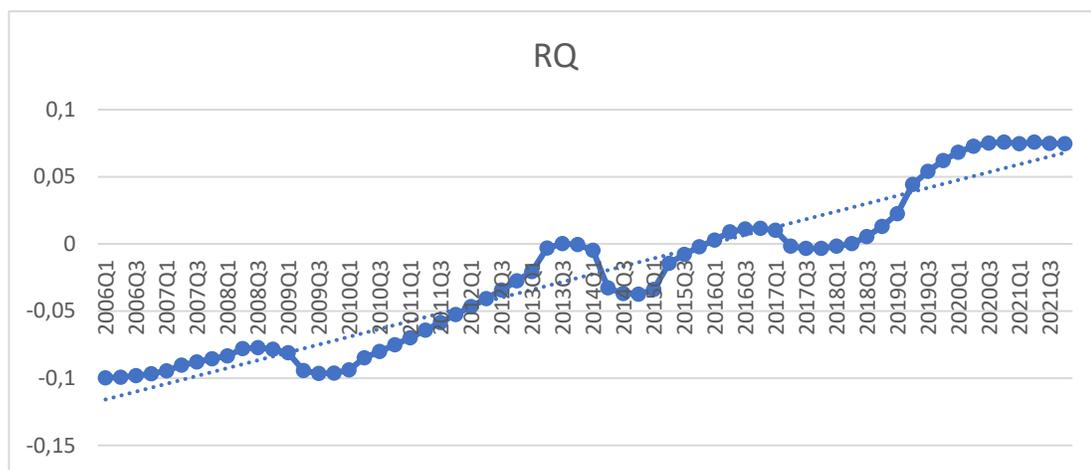
Regulatory Quality Index cara untuk menilai seberapa mudah atau sulitnya melakukan bisnis disuatu negara. Hal ini didasarkan pada semakin mudah untuk memulai dan menjalankan bisnis, semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Indeks regulasi melihat berbagai faktor seperti biaya untuk memulai bisnis, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin-izin, perlindungan hak-hak pemilik bisnis dan kreditor, serta peraturan dan hambatan lain yang mungkin menghambat pertumbuhan bisnis. Semua faktor ini dinilai dan digabungkan menjadi sebuah indeks yang dapat membandingkan seberapa mudah atau sulitnya melakukan bisnis disuatu negara.

Regulatory Quality Index merupakan kemampuan pemerintah atau regulator dalam merancang, mengimplementasikan dan menegakkan peraturan yang berkualitas dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi kepentingan publik, dan mengurangi kegagalan pasar. *Regulatory Quality Index* penting agar terciptanya lingkungan bisnis yang stabil yang dapat mendorong tumbuhnya investasi. Regulatori yang baik harus mencakup transparansi, keterbukaan, konsistensi, akuntabilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar (World Bank, 2021b).

Regulatory Quality Index merujuk pada kualitas regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis di suatu negara. *Regulatory Quality Index* atau indeks kualitas regulasi dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu jika suatu negara memiliki regulasi yang baik dan terpercaya, maka bisnis dan investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk menginvestasikan uang mereka. Karena regulasi yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan, sehingga para investor merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modal mereka. Sebaliknya, jika regulasi buruk atau tidak dapat

diandalkan, para investor mungkin enggan untuk menginvestasikan uang mereka karena risiko yang lebih besar.

Dasar teori yang menyatakan bahwa *Regulatory Quality Index* dapat mempengaruhi investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri dibahas dalam teori Keynes yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merugulasi ekonomi dengan kebijakan fiskal maupun moneter.



Sumber: Worldbank.org

Gambar 5. Perkembangan *Regulatory Quality index* Indonesia periode 2006:Q1-2021:Q4

Berdasarkan data *Regulatory Quality Index* diatas, maka Indonesia masuk kategori sedang atau medium dimana *Regulatory Quality Index* Indonesia masuk dalam skor -0,5 sampai 0,5. Artinya kualitas regulasi di Indonesia saat ini dapat dianggap sedang atau berada dalam tingkat dinamis. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan iklim investasi dan mengurangi hambatan regulasi, yaitu pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program reformasi kebijakan untuk menyederhanakan prosedur investasi, semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap transparansi dalam proses regulasi, perlindungan hukum, dan pemerintah Indonesia juga telah mendorong dialog dan konsultasi dengan sektor swasta untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Meskipun ada

perbaikan yang terjadi namun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut termasuk pengurangan birokrasi yang berlebihan peningkatan efisiensi dalam perizinan, dan pemantauan yang lebih baik terhadap implementasi regulasi.

Hubungan antara kualitas regulasi (*Regulatory Quality index*) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dijelaskan bahwa ketika *Regulatory Quality index* skala angkanya semakin tinggi maka keputusan investor dalam berinvestasi akan lebih besar. Seperti pada gambar diatas, secara keseluruhan tren *Regulatory Quality index* meningkat secara keseluruhan.

Penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Okechukwu Lheonu, 2019), dimana *Regulatory Quality Index* berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Afrika. Begitu juga penelitian (Chinzara et al., 2023) yang menyatakan bahwa *Regulatory Quality Index* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi swasta di Afrika. Penelitian Helmi (2014) juga menyatakan bahwa kualitas regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi domestik di ASEAN.

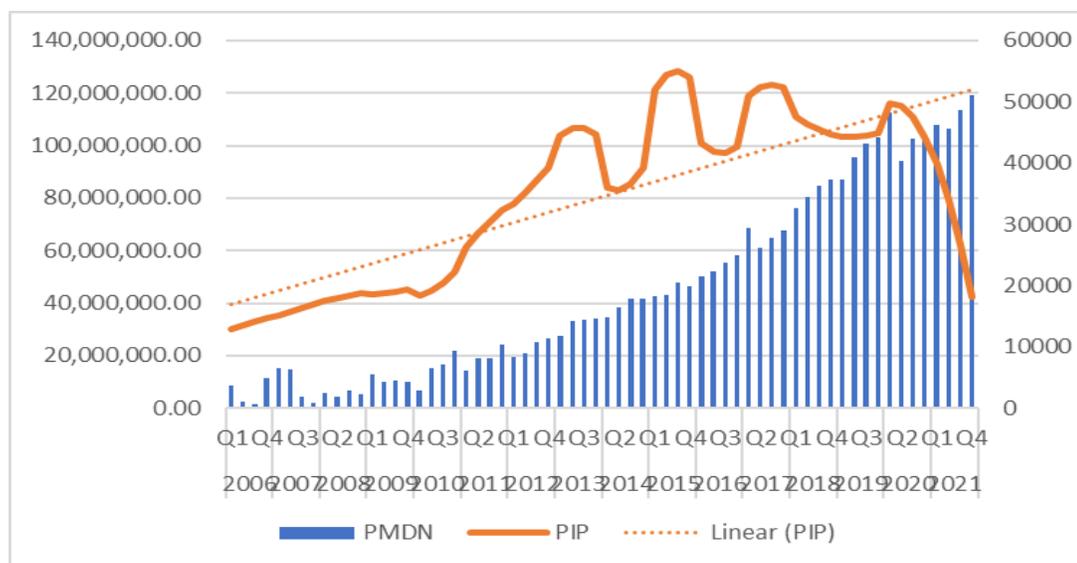
Pengeluaran investasi pemerintah dalam hal ini adalah pengeluaran barang modal dimana pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek investasi dalam rangka meningkatkan infrastuktur dan sumber daya negara. Pengeluaran ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam negeri seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Pengeluaran investasi pemerintah dapat memiliki dampak positif pada perekonomian negeri, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan bisnis. Selain itu, investasi pemerintah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan efisiensi ekonomi. Investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur untuk tujuan layanan

masyarakat seperti proyek jalan raya, jembatan, dan sebagainya akan berpengaruh positif terhadap investasi swasta.

Konsep alur pengeluaran investasi pemerintah dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai berikut. Dalam konteks Indonesia istilah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) merujuk pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau investor dalam negeri di Indonesia untuk mendirikan atau mengembangkan usaha, jadi untuk dianggap sebagai PMDN biasanya perusahaan atau investor harus memiliki atau mendirikan usaha di Indonesia. Investasi tersebut dapat berupa pendirian perusahaan baru, pengembangan bisnis yang sudah ada atau proyek investasi lainnya yang melibatkan penggunaan modal dalam negeri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam undang-undang tersebut menjelaskan persyaratan dan prosedur untuk melakukan PMDN. Saat melakukan pendirian atau pengembangan usaha, infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, dan sarana transportasi yang efisien dapat membantu perusahaan mengurangi biaya transportasi, pengiriman barang dan distribusi produk. Misalnya, akses yang mudah ke pelabuhan atau bandara memungkinkan perusahaan untuk mengimpor atau mengekspor barang dengan cepat dan efisien. Dengan demikian perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien dan mengurangi biaya logistik.

Beberapa teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan investasi dalam negeri diantaranya, teori *crowding-in* yang menyatakan bahwa kenaikan pengeluaran investasi pemerintah akan meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hal ini karena pengeluaran investasi pemerintah berupa pengeluaran barang modal seperti pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan raya, jaringan listrik dan sarana prasarana dapat mempengaruhi iklim investasi di suatu negara. Dengan adanya infrastruktur yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan produksi dan mengurangi biaya produksi yang pada akhirnya

dapat meningkatkan profitabilitas yang dapat mendorong perusahaan untuk memperluas bisnis dan meningkatkan Penanaman Modal Dalam Negeri.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 6. Perkembangan pengeluaran investasi pemerintah pusat periode 2006:Q1-2021:Q4

Gambar diatas menjelaskan secara keseluruhan ketika tren pengeluaran investasi meningkat maka penanaman modal juga meningkat, hal ini karena ketika pengeluaran investasi pemerintah yang terdiri dari pengeluaran barang modal seperti membangun infrastruktur dan sumber daya negara yang meningkat maka salah satunya akan mempengaruhi biaya produksi seperti mahalnya biaya distribusi karena akses ke sumber daya susah akan menurun. Contohnya ketika tahun 2010 pengeluaran investasi pemerintah sedang gencarnya dinaikkan karena paska krisis global tahun 2008 ekonomi Indonesia lumayan terdampak sehingga pemerintah menaikkan pengeluaran belanja modal dalam hal ini investasi agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga gairah investasi semakin naik. Pada tahun 2010;Q1 pengeluaran investasi pemerintah sebesar Rp18.362 miliar naik menjadi Rp19.156 miliar sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2010;Q1 6.759.011 miliar naik pada Q2 menjadi 15.174.172 Miliar rupiah. Begitu juga pada tahun 201;Q1 pengengeluaran

investasi pemerintah sebesar Rp50.979 miliar menjadi 52.433 miliar pada Q2 tahun 2017, dimana saat itu pembangunan infrastruktur sedang gencar gencarnya juga dibangun hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peringkat indeks daya saing infrastruktur global pada tahun 2017. Penelitian yang mendukung yaitu penelitian oleh (Hatano, 2010) yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di negara Jepang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Nasional, Suku Bunga, Kurs, Pengeluaran Investasi Pemerintah Dan *Regulatory Quality Index* Terhadap PMDN Di Indonesia(2006Q1-2021Q4)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh jangka panjang variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jangka pendek variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia?
3. Bagaimana variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* bersama-sama mempengaruhi PMDN di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka pendek variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* secara bersama-sama mempengaruhi PMDN di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh jangka panjang pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh jangka pendek pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* secara bersama-sama mempengaruhi PMDN di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Investasi

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (HS & Sutrisno, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.

3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah

Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

1. Orang-perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia

b. Prosedur dan syarat-syarat Investasi dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang di investasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Commanditaire Vennootschap (CV)
3. Firma (Fa)
4. Badan Usaha Koperasi
5. BUMN f. BUMD
6. Perorangan.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir Model I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus di isi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga

kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan

c. Teori Investasi

1. Teori Keynesian

Teori investasi Keynesian adalah salah satu teori dalam ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat output dan pendapatan nasional dalam perekonomian.

Rumus investasi Keynesian adalah sebagai berikut:

$$I = I_0 + b(Y-T)$$

Dimana:

I = investasi total

I_0 = investasi otonom atau investasi yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

b = margin investasi atau cenderungnya para pengusaha untuk menambah investasi dalam huungannya dengan perubahan pendapatan nasional

Y = pendatan nasional

T = pajak

Dalam teori Keynesian dapat menjelaskan pengaruh pendapatan nasional: Keynes berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula investasi yang dilakukan para pengusaha. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang yang tersedia untuk diinvestasikan.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi

Sebagai sebuah keputusan yang rasional, investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi.

1. Tingkat pengembalian yang diharapkan (*Expected Rate Of Return*)

Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan.

2. Kondisi internal perusahaan

Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi. Selain ketiga aspek teknis tersebut diatas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, terutama di negara sedang berkembang.

3. Kondisi eksternal perusahaan

Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan.

4. Biaya investasi

Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun. Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama (>3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, dan stabilitas politik.

2. Pendapatan Nasional (PDB)

Pendapatan nasional (PDB) merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional (PDB) adalah indikator yang mengukur jumlah output akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk sendiri maupun bukan penduduk, tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri (Todaro & Smith, 2008).

Terdapat dua jenis berdasarkan harga yang telah ditetapkan pasar yaitu sebagai berikut (Mankiw, 2007) :

a. PDB harga berlaku

PDB pada harga berlaku atau PDB nominal adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu menurut harga yang berlaku pada periode tersebut.

b. PDB harga konstan

PDB pada harga konstan atau PDB riil adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar, untuk dipergunakan seterusnya dalam menilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun berikutnya.

Untuk menghitung besaran PDB digunakan tiga pendekatan yaitu

a. Pendekatan Produksi

Besaran PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan produksi adalah:

$$\text{PDB} = \text{harga} \times \text{kuantitas}$$

b. Pendekatan Pendapatan

Besaran PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan adalah:

$$\text{PDB} = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

c. Pendekatan pengeluaran

Besaran PDB adalah semua komponen permintaan akhir dalam proses produksi suatu negara. Rumus untuk menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$\text{PDB} = C + I + G + (X-M)$$

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan suatu indikator dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk.

3. Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang harus dibayar untuk dana pinjaman tersebut, biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun (Mishkin, 2017). Sedangkan menurut (Ekananda, 2015) suku bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh pemilik modal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik modal. Tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran untuk aset perekonomian yang paling likuid (uang). Suku bunga diimplementasikan pada operasi moneter oleh BI melalui pengelolaan likuiditas di pasar keuangan dalam rangka mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-

Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan *BI rate*. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil.

Hubungan investasi dan suku bunga dapat dijelaskan melalui Fungsi Investasi. Didasarkan pada fungsi investasi sederhana yang mengaitkan investasi dengan tingkat bunga riil.

$$I = I(r)$$

Fungsi ini menyatakan bahwa kenaikan tingkat riil menurunkan investasi, karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman untuk mendanai proyek-proyek investasi, maka kenaikan tingkat bunga akan mengurangi investasi yang direncanakan.

4. Kurs

Kurs atau kurs dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain (Ekananda, 2015). Kurs mencakup dua mata uang negara, maka keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan sisi permintaan dari kedua mata uang tersebut. Pergerakan kurs akan berdampak pada nilai komoditi dan aset.

Kurs umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal (*nominal exchange rate*) adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan kurs riil (*riil exchange rate*) adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara.

Kurs atau kurs mempunyai tiga sistem, antara lain:

a. Sistem kurs tetap (*fix exchange rate system*)

Nilai kurs ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini kebijakan dilaksanakan oleh otoritas moneter yaitu Bank sentral.

b. Kurs mengambang (*floating exchange rate system*)

Nilai kurs ditentukan oleh mekanisme pasar, tergantung dari penawaran dan permintaan mata uang kedua negara tanpa campur tangan pemerintah.

c. Kurs gabungan

Sistem kurs gabungan adalah sistem kurs kombinasi antara kurs tetap dan kurs mengambang. Kurs ini untuk mengontrol *balance of payment*, kurs ditetapkan oleh otoritas moneter.

Kurs atau kurs dapat mengalami kondisi apresiasi dan depresiasi. Mata uang suatu negara dalam kondisi terapresiasi jika kursnya mengalami kenaikan terhadap mata uang negara lain dan dikatakan terdepresiasi jika nilainya mengalami penurunan terhadap mata uang negara asing.

5. Pengeluaran investasi pemerintah

Pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional (Sukirno, 2000).

Menurut (Mangkoesubroto, 2008) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan

oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Dalam pengeluaran pemerintah terdapat pengeluaran investasi pemerintah yang dalam hal ini adalah belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Barang modal didefinisikan sebagai berbagai bentuk barang seperti bangunan, mesin-mesin dan perlengkapannya, sarana atau alat transportasi, serta barang modal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan proses produksi dalam suatu perekonomian. Barang modal yang menjadi input dalam proses produksi tersebut akan digunakan secara terus menerus, yang diperhitungkan akan habis digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

6. *Regulatory Quality Index*

Regulatory Quality Index cara untuk menilai seberapa mudah atau sulitnya melakukan bisnis disuatu negara. Hal ini didasarkan pada semakin mudah untuk memulai dan menjalankan bisnis, semakin baik bagi perekonomian negara tersebut. Indeks regulasi melihat berbagai faktor seperti biaya untuk memulai bisnis, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin-izin, perlindungan hak-hak pemilik bisnis dan kreditor, serta peraturan dan hambatan lain yang mungkin menghambat pertumbuhan bisnis. Semua faktor ini dinilai dan digabungkan menjadi sebuah indeks yang dapat membandingkan seberapa mudah atau sulitnya melakukan bisnis disuatu negara.

Regulatory Quality Index merupakan kemampuan pemerintah atau regulator dalam merancang, mengimplementasikan dan menegakkan peraturan yang berkualitas dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi kepentingan publik, dan mengurangi kegagalan pasar. *Regulatory Quality Index* penting agar terciptanya lingkungan bisnis yang stabil yang dapat mendorong tumbuhnya investasi. Regulatori yang baik harus mencakup transparansi, keterbukaan, konsistensi, akuntabilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar (World Bank, 2021).

Regulatory Quality Index merujuk pada kualitas regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis di suatu negara. *Regulatory Quality Index* atau indeks kualitas regulasi dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu jika suatu negara memiliki regulasi yang baik dan terpercaya, maka bisnis dan investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk menginvestasikan uang mereka. Karena regulasi yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan, sehingga para investor merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modal mereka. Sebaliknya, jika regulasi buruk atau tidak dapat diandalkan, para investor mungkin enggan untuk menginvestasikan uang mereka karena risiko yang lebih besar.

Indeks ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang bekerja sama dengan World Bank. Survei tersebut dilakukan pada sejumlah responden yang meliputi bisnis, pengusaha, akademisi, maupun pemimpin masyarakat di negara-negara di seluruh dunia.

Regulatory Quality Index digunakan sebagai salah satu ukuran dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indikator ini juga membantu dalam membandingkan kualitas regulasi dan kebijakan antara negara-negara di seluruh dunia. Semakin tinggi nilai *Regulatory Quality Index*, semakin baik kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah, sehingga semakin kondusif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri maupun asing.

World Bank menggunakan beberapa indikator dalam merumuskan indeks *regulatory quality*, antara lain:

- a. **Transparansi regulasi:** indikator ini mencakup keberadaan dokumen publik yang menjelaskan peraturan, prosedur dan kebijakan, serta akses publik ke informasi tentang regulasi.
- b. **Keterbukaan regulator:** indikator ini mengukur sejauh mana regulator terbuka terhadap pendapat dan masukan publik dalam proses regulasi.
- c. **Kualitas peraturan:** indikator ini mencakup kualitas peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan publik.
- d. **Prediktabilitas:** indikator ini mencakup kemampuan regulator untuk merancang peraturan yang konsisten dan dapat diprediksi.

- e. Kemampuan penegakan hukum: indikator ini mencakup kemampuan regulator dalam menegakkan peraturan dan menjaga disiplin pasar.
- f. Kemampuan untuk beradaptasi: indikator ini mencakup kemampuan regulator dalam mengubah peraturan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan pasar.
- g. Kepatuhan terhadap peraturan: indikator ini mencakup tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada.
- h. Dalam memperoleh izin: indikator ini mencakup kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan izin lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Indikator-indikator di atas digunakan oleh World Bank dalam merumuskan Indeks Kualitas Regulasi (*Regulatory Quality Index*) yang digunakan untuk membandingkan kualitas regulasi antara negara-negara di seluruh dunia. Skala *Regulatory Quality Index* yang dikembangkan oleh World Bank sebenarnya adalah dari -2,5 hingga 2,5, dengan penjabaran sebagai berikut:

Sangat Rendah (Very Low): Skor -2,5 hingga -1,5

Rendah (Low): Skor -1,5 hingga -0,5

Sedang (Medium): Skor -0,5 hingga 0,5

Tinggi (High): Skor 0,5 hingga 1,5

Sangat Tinggi (Very High): Skor 1,5 hingga 2,5

Setiap negara diberikan skor berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan oleh World Bank, dan kemudian ditempatkan pada salah satu level skala pengukuran tersebut. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas pemerintahan yang lebih baik dan lebih efektif.

7. Pengaruh Variabel Bebas dengan PMDN

a. Pengaruh Pendapatan Nasional dengan PMDN

Perubahan pendapatan nasional akan mempengaruhi jumlah output agregat yang diminta masyarakat sehingga akan mempengaruhi fungsi investasi agregat. Semakin cepat laju pertumbuhan output agregat, maka akan semakin besar pula permintaan untuk melakukan investasi (Wahyuni, 2004). Hal ini didukung oleh teori Keynes dengan “*psychological Law of consumption*” yang pada intinya menyatakan bahwa, apabila pendapatan bertambah maka konsumsi akan barang dan jasa akhir akan bertambah pula. Menghadapi kenaikan permintaan barang dan jasa akhir ini maka produsen akan mengantisipasinya dengan jalan memperluas kapasitas produksinya. Untuk memperluas produksi dibutuhkan tambahan barang modal. Dengan perkataan lain, diperlukan investasi baru yang mungkin berupa mesin, perluasan pabrik, bahan mentah dan sebagainya. Dengan demikian hubungan antara pendapatan nasional dengan investasi adalah positif. Tingkat pertumbuhan PDB yang baik akan memberikan efek yang positif bagi negara karena akan menarik para investor untuk berinvestasi (Shahzad, 2013).

b. Pengaruh suku Bunga dengan PMDN

Suku bunga adalah faktor penting dalam mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi di masa depan. Menurut (Anna, 2012), tingkat bunga adalah tingkat yang dibebankan atau dibayar untuk penggunaan uang atau lebih tepatnya biaya pinjaman. Terjadinya peningkatan suku bunga mengakibatkan investasi akan mengalami suatu penurunan dan begitu sebaliknya, apabila suku bunga turun sehingga investasi akan mengalami suatu peningkatan hal ini dikarenakan biaya dari investasi mengalami penurunan (Ernita, 2013). Hal ini dapat dijelaskan apabila seorang investor bersedia menanamkan uangnya pada suatu proyek investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari penanaman modal yang dilakukannya tersebut dimasa yang akan datang. Apabila suku Bunga yang berlaku lebih kecil dibanding dengan nilai sekarang keuntungan yang akan diperoleh maka investor akan memilih menanamkan modalnya. Sebaliknya apabila suku bunga yang berlaku lebih besar dari pada

keuntungan keuntungan yang akan diperoleh dari suatu proyek investasi, maka investor nasional tidak akan menjalankan proyek merugi tersebut dan memilih menyimpan uangnya di bank.

Pengaruh suku bunga terhadap investasi dalam hal ini PMDN dapat digambarkan dalam persamaan

$$I = I(r)$$

Dimana I dan r mempunyai relasi negative , jika r tinggi , I akan cenderung turun demikian pula sebaliknya. Karena hubungan I dan r negative , maka kurva yang terbentuk ber'slope negative. Kenakikan tingkat suku bunga (dari r1 ke r2) akan menurunkan tingkat investasi sebesar ΔI (dari I (r1) ke I(r2)).

Teori suku bunga dan investasi. Teori ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat PMDN. Menurut teori ini, tingkat suku bunga yang tinggi dapat membuat investasi menjadi kurang menarik bagi investor, karena tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang rendah akan membuat ini menjadi lebih menarik bagi investor, karena biaya pinjaman lebih rendah dan tingkat keuntungan yang diharapkan lebih tinggi. Oleh karena itu, tingkat suku bunga memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat investasi akan meningkat jika tingkat suku bunga rendah dan sebaliknya.

c. Pengaruh kurs dengan PMDN

Kurs atau kurs mata uang memiliki pengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kurs mempengaruhi harga jual produk suatu negara, sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Ketika nominal kurs mengalami peningkatan maka harga barang dalam negeri dianggap jauh lebih murah oleh konsumen luar negeri sehingga terjadi peningkatan penjualan ke luar negeri (ekspor) yang akan menaikkan

laba perusahaan, maka kemungkinan perusahaan menaikkan tingkat produksinya akan lebih tinggi dan memperluas bisnisnya yang pada akhirnya akan menaikkan Penanaman Modal Dalam Negeri.

d. Pengaruh pengeluaran investasi pemerintah dengan investasi

Pengeluaran investasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini karena investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif untuk investasi dengan cara meningkatnya aksesibilitas dan meningkatnya daya saing.

e. Pengaruh *Regulatory Quality Index* dengan PMDN

Regulatory Quality Index memiliki pengaruh Positif terhadap tingkat investasi dalam negeri dalam hal ini PMDN. meningkatnya *Regulatory Quality Index* pemerintah akan menarik bagi investor karena lingkungan bisnis yang stabil, transparan dan dapat diandalkan. Selain itu juga salah satu indikator *Regulatory Quality Index* terdapat indikator mengenai kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan izin lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong Penanaman Modal Dalam Negeri lebih besar lagi.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 3. Ringkasan hasil penelitian Rio, Junaidi, dan Candra Mustika

Judul	Determinasi Investasi di Provinsi Jambi : Pendekatan <i>Error Correction Model</i> (ECM)
Penulis	Rio, Junaidi, dan Candra Mustika
Variabel	Variabel Terikat: Investasi (PMDN) Variabel Bebas: Suku bunga, kurs, ekspor, harga minyak dunia, daya listrik
Metode Analisis	<i>Error Correction Model</i> (ECM)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	<p>Variabel suku bunga mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap investasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek.</p> <p>Variabel kurs berpengaruh positif signifikan terhadap investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang</p> <p>Variabel ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap investasi dalam jangka pendek namun tidak dalam jangka panjang</p> <p>Variabel harga minyak dunia berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi dalam jangka pendek namun tidak dalam jangka panjang</p> <p>Variabel daya listrik berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek namun tidak dalam jangka panjang</p>
--	---

Tabel 4. Ringkasan hasil penelitian Rasmane Oudraogo, Hamidou Sawadago, R. Sawadago

Judul	<i>Impact of Public Investment on private investment in sub-saharan Africa</i>
Penulis	Rasmane Oudraogo, Hamidou Sawadago, R. Sawadago
Variabel	Variabel Terikat: <i>domestic private investment</i> Variabel Bebas: <i>public investment, GDP, Credit, Term of trade shock</i>
Metode Analisis	OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel <i>public investment</i> mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap <i>domestic private investment</i> . Variabel GDP berpengaruh positif signifikan terhadap <i>domestic private investment</i>

	<p>Variabel <i>credit</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>domestic private investment</i></p> <p>Variabel <i>term of trade shock</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>domestic private investment</i></p>
--	--

Tabel 5. Ringkasan hasil penelitian Ibrahim M. Awad, Ghada K. Al-Jerashi, dan Zaid Ahmad Alabaddi

Judul	<i>Determinant of private domestic investment in Palestine: time series analisis</i>
Penulis	Ibrahim M. Awad, Ghada K. Al-Jerashi, dan Zaid Ahmad Alabaddi
Variabel	Variabel Terikat: <i>domestic private investment</i> Variabel Bebas: <i>interest rate</i> , dan <i>political instability</i>
Metode Analisis	ARDL (<i>Autoregressive Distributed Lag</i>) dan VAR (<i>Vector Autoregressive Model</i>)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>interest rate</i> berpengaruh negative terhadap <i>domestic private investment</i> . sedangkan variabel <i>political instability</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>domestik private investment</i> . hasil dari penelitian ini sejalan dengan pendekatan neoklasik yang menyatakan bahaw <i>interest rate</i> berpengaruh negatif terhadap <i>domestic private investmen</i> . Namun dalam jangka Panjang tidak perpengaruh signifikan serta tidak ada kausalitas antara <i>interest rate</i> terhadap <i>domestic private investment</i> .

Tabel 6. Ringkasan hasil penelitian Chimere Okechukwu Lheonu

Judul	<i>Governance and domestic investment in Africa</i>
Penulis	Chimere Okechukwu Lheonu, C.
Variabel	Variabel Terikat: <i>domestic investment</i>

	Variabel Bebas: <i>control of corruption, rule of law, government effectiveness, regulatory quality</i>
Metode Analisis	PLS (<i>Panel Least Square</i>)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>control of corruption</i> , dan <i>rule of law</i> di Africa region berpengaruh positif signifikan terhadap domestik investment. variabel <i>government effectiveness</i> di Africa region berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap domestik investment. variabel <i>regulatory quality</i> berpengaruh positif signifikan terhadap domestik investment.

Tabel 7. Ringkasan hasil penelitian Thomas Galih Pramudita, Setyabudi Indartono, Maimun Sholeh

Judul	<i>The Antecedent of Domestic investment in Indonesia : AutoRegressive Distributed Lag Approach</i>
Penulis	Thomas Galih Pramudita, Setyabudi Indartono, Maimun Sholeh
Variabel	Variabel Terikat: <i>domestic private investment</i> Variabel Bebas: <i>economic growth, exchange rate, inflation, real interest rates</i>
Metode Analisis	ARDL (<i>Autoregressive Distributed Lag</i>)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga mempunyai pengaruh positif terhadap <i>domestic private investment</i> dalam jangka pendek. Namun inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan PMDN di Indonesia. Karena itu pemerintah perlu mengatur agar mengurangi suku

	<p>bunga pinjaman investasi dan mempertahankan stabilitas politik agar dapat menaikkan PMDN.</p> <p>Sedangkan pada jangka panjang, hanya kurs yang dapat menaikkan PMDN sedangkan pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap PMDN. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah kurang memihak pada investor.</p>
--	--

Tabel 8. Ringkasan hasil penelitian Aamer Sohn, Umer Rehman, dan Muhammad Azeem

Judul	<i>Economic Determinants of Domestic Investment : A Case Pakistan</i>
Penulis	Aamer Sohail, Umer Rehman, dan Muhammad Azeem
Variabel	Variabel Terikat: <i>Gross domestic investment</i> Variabel Bebas: GDP, FDI, M2, dan <i>eksport of good and services</i>
Metode Analisis	OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel GDP, FDI, <i>eksport of good and service</i> , serta jumlah uang beredar mempunyai pengaruh positif signifikan.

C. Kerangka Pemikiran

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu variabel investasi sebagai variabel terikat . berdasarkan penelitian terdahulu faktor -faktor yang mempengaruhi PMDN adalah pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *Regulatory Quality Index*.

Pendapatan nasional memiliki pengaruh positif terhadap PMDN. Perubahan pendapatan nasional akan mempengaruhi jumlah output agregat yang diminta

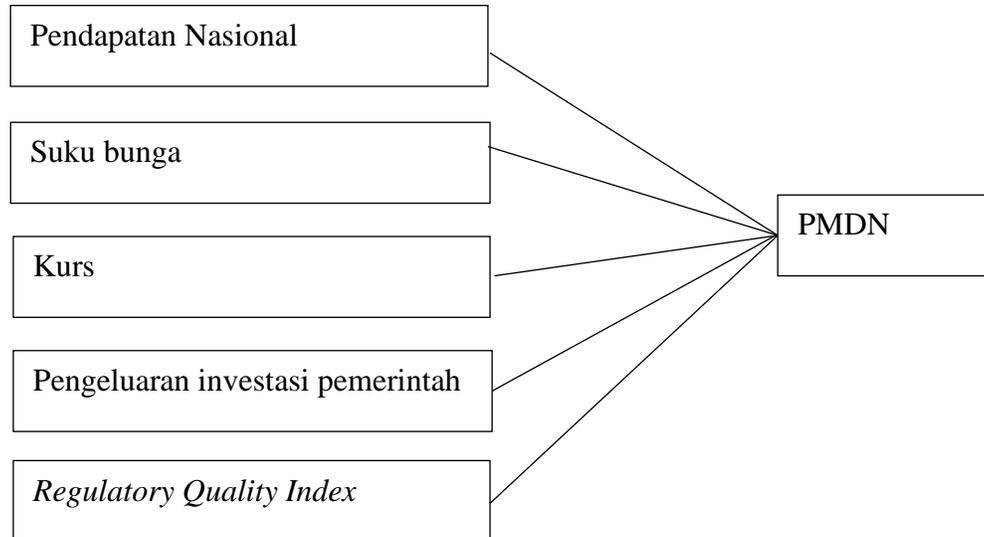
masyarakat semakin cepat laju pertumbuhan output agregat, maka akan semakin besar pula permintaan untuk melakukan investasi.

Suku bunga berpengaruh negatif terhadap PMDN. Apabila suku bunga yang berlaku lebih kecil dibanding dengan nilai sekarang keuntungan yang akan diperoleh maka investor akan memilih menanamkan modalnya. Sebaliknya apabila suku bunga yang berlaku lebih besar dari pada keuntungan yang akan diperoleh dari suatu proyek investasi, maka investor nasional tidak akan menjalankan proyek merugi tersebut dan memilih menyimpan uangnya di bank.

Kurs berpengaruh positif terhadap PMDN. Peningkatan kurs dalam negeri, dapat mempengaruhi ekspor, karena dengan meningkatnya kurs akan memberikan dampak daya saing ekspor meningkat. Kurs yang meningkat membuat produk domestik lebih murah bagi konsumen luar negeri sehingga meningkatkan daya saing produk domestik.

Regulatory Quality Index berpengaruh positif terhadap PMDN. Ketika *Regulatory Quality Index* meningkat skalanya artinya kualitas regulasi disemua bidang layanan meningkat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dalam menginvestasikan modalnya di dalam negeri.

Pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap PMDN. investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur untuk tujuan layanan-layanan masyarakat seperti proyek jalan raya, jembatan dan lain sebagainya akan berpengaruh positif terhadap investasi.



Gambar 7. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis penelitian

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah pada penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa variabel pendapatan nasional (PDB) memiliki pengaruh positif terhadap PMDN di Indonesia
2. Diduga bahwa variabel suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap PMDN di Indonesia
3. Diduga variabel kurs memiliki pengaruh positif terhadap PMDN di Indonesia
4. Diduga variabel pengeluaran investasi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap PMDN di Indonesia.
5. Diduga variabel *Regulatory Quality Index* memiliki pengaruh positif terhadap PMDN di Indonesia

6. Diduga variabel pendapatan nasional (PDB), suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, dan *Regulatory Quality Index* secara bersama-sama mempengaruhi PMDN di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai analisis “Pengaruh Pendapatan Nasional, suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *Regulatory Quality Index* terhadap PMDN di Indonesia (2006:Q1-2021:Q4)”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Indonesia, yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia pada periode 2006:Q1-2021:Q4, beserta faktor yang mempengaruhinya yaitu pendapatan nasional, suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *Regulatory Quality Index*.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data pendapatan nasional, suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah, *Regulatory Quality Index* dan PMDN. Data bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (SEKI – BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Worldbank, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) yang dimulai pada periode tahun 2006 Q₁ sampai Desember 2021 Q₄. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 9. Variabel Penelitian

Nama Variabel	Periode	Simbol Variabel	Satuan	Sumber
PMDN	Triwulan	PMDN	Juta Rupiah	NSWI Pengelolaan Data Mandiri BKPM
Pendapatan nasional	Triwulan	PDB	Milliar Rupaih	Badan Pusat Statistik (BPS)
Suku bunga	Triwulan	R	Persen	SEKI-BI
Kurs	Triwulan	KURS	Rupiah / US\$	SEKI-BI
<i>Regulatory Quality Index</i>	Triwulan	RQ	Skala -2,5 - 2,5	Worldwide Governnace indikator Worldbank
Pengeluaran Investasi Pemerintah	Triwulan	PIP	Triliun Rupiah	Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

C. Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Data diperoleh dari Nasional Single Window For Investment Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode 2006:Q1-2021:Q4 dengan satuan juta rupiah.

2. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPJS) 2006;Q1-2021;Q4 dengan satuan Miliar rupiah.
3. Suku Bunga merupakan pembayaran atas modal yang dapat dipinjam dari pihak lain yang dinyatakan dalam persentase. Suku bunga yang dipakai yaitu BI Rate, BI Rate merupakan suatu kebijakan terkait suku bunga yang menjadi representasi dari sikap kebijakan moneter dengan dasar kesepakatan pihak Bank Indonesia serta diketahui masyarakat. Data diperoleh dari situs Bank Indonesia pada periode 2006;Q1-2021;Q4 dengan satuan persentase.
4. Kurs merupakan harga satuan mata uang suatu negara terhadap negara lainnya. Data kurs yang digunakan adalah kurs nominal atau kurs tengah Indonesia terhadap dollar AS. Data diperoleh dari situs Bank Indonesia pada periode 2006;Q1-2021;Q4 dengan satuan Rupiah per dollar Amerika Serikat.
5. *Regulatory Quality Index* adalah indeks yang mengukur kemampuan pemerintah atau regulator dalam merancang, mengimplementasikan, dan menegakkan peraturan yang berkualitas dan efektif. Data diperoleh dari situs Worldwide Governance Indicators Databank pada Worldbank periode 2006;Q1-2021;Q4 dengan satuan skala -2,5 – 2,5. Dimana dengan kategori skala -2,5 hingga -1,5 artinya kualitas regulasi sangat rendah (*Very Low*), skala -1,5 hingga -0,5 artinya kualitas regulasi rendah (*Low*), Skala -0,5 hingga 0,5 artinya kualitas regulasi sedang (*Medium*), skala 0,5 hingga 1,5 artinya kualitas regulasi tinggi (*High*), skala 1,5 hingga 2,5 artinya kualitas regulasi sangat tinggi (*Very High*). Dari data *Regulatory Quality Index* Indonesia masuk ke kategori medium dimana *Regulatory Quality Index* Indonesia berada di antara skala -0,961 dan 0,2981 artinya masuk kedalam kategori skala sedang (medium) -0,5 sampai 0,5.

6. Pengeluaran investasi pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan tujuan investasi, dalam hal ini proksi pengeluaran investasi pemerintah yaitu pengeluaran belanja modal. Pengeluaran belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk menciptakan aset jangka Panjang di dalam perekonomian. Data diperoleh dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2006;Q1-2021;Q4 dengan satuan triliun rupiah.

D. Model dan Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Model analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier pada persamaan (2.7) yaitu:

$$PMDN_t = \beta_0 + \beta_1 PDB_t + \beta_2 R_t + \beta_3 Kurs_t + \beta_4 PIP_t + \beta_5 RQ_t + e_t \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

PMDN	=	Penanaman Modal Dalam Negeri
PDB	=	Produk Domestik Bruto
R	=	Suku Bunga
KURS	=	Kurs nominal Rupiah/US\$
PIP	=	Pengeluaran Investasi Pemerintah
RQ	=	<i>Regulatory Quality Index</i>
B_0, \dots, B_4	=	koefisien regresi
e_t	=	error term/ residu
t	=	periode wa

1. Uji Stasioneritas (*Unit Root*)

Secara umum yang dimaksud stasioner pada data runtut waktu (*time series*) adalah data yang memiliki rerata dan varians yang cenderung konstan. Salah satu konsep penting untuk data *time series* adalah kondisi data yang stasioner atau tidak stasioner. Suatu data dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria yaitu rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Apabila data yang digunakan dalam suatu model tidak stasioner, maka akan menyebabkan hasil regresi yang meragukan atau disebut regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung adalah hasil regresi yang menunjukkan koefisien regresi yang signifikan dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun variabel di dalam model tidak saling berhubungan (Widarjono, 2017).

Terdapat 2 metode uji akar unit untuk mendeteksi stasioneritas data *time series* yaitu *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test* dan *Phillips-Perron (PP)*. Penelitian ini menggunakan uji akar unit yang pertama dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test*. Jika suatu data *time series* tidak stasioner pada orde nol, I (0), maka stasioneritas data tersebut bisa dicari melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada orde ke-n (*first difference* atau I (1), atau *second difference* I (2), dan seterusnya).

Hipotesis pengujian stasioner metode ADF:

$H_0 : \phi = 0$, terdapat *unit root*, tidak stasioner.

$H_a : \phi \neq 0$, tidak terdapat *unit root*, stasioner.

Untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya yakni distribusi statistik. Jika nilai absolut statistik ADF > nilai kritis distribusi statistik maka menolak H_0 sehingga data yang diamati stasioner. Jika nilai absolut statistik ADF < nilai kritis distribusi statistik

maka menerima H_0 sehingga data yang diamati tidak stasioner. Jika semua variabel adalah tidak stasioner, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

2. Uji kointegrasi

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah residual terkointegrasi stationary atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi dikenal juga dengan istilah *error*, karena deviasi terhadap ekuilibrium jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. Dalam penelitian ini uji kointegrasi menggunakan uji kointegrasi Engle-Granger. Uji kointegrasi Engle-Granger (EG) berhubungan dengan uji akar unit yang dikembangkan oleh Dickey-Fuller melalui uji ADF. Untuk melakukan uji kointegrasi dengan EG, maka kita harus melakukan regresi persamaan dan kemudian mendapatkan residualnya, kemudian residual ini kita uji menggunakan ADF. Dari hasil estimasi nilai statistik ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Kriteria pengujian sebagai berikut:

$H_0 : \beta_0 = 0$, berarti variabel-variabel tidak terkointegrasi

$H_a : \beta_0 \neq 0$, berarti variabel-variabel terkointegrasi

Jika nilai *trace value* > *critical value* maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika nilai *trace value* < *critical value* maka H_0 diterima dan H_0 ditolak.

3. Error Correction Model (ECM)

Setelah melakukan uji kointegrasi dan hasil pada model terkointegrasi atau dengan kata lain terdapat hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) atau keduanya tidak mencapai keseimbangan. Ketidakseimbangan inilah yang sering ditemui dalam perilaku ekonomi. Artinya, bahwa apa yang diinginkan pelaku ekonomi (*desired*) belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Adanya perbedaan apa yang diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya penyesuaian (*adjustment*). Model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ ECM*). Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan akhirnya dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM memiliki kegunaan utama yaitu untuk mengatasi masalah data *time series* yang tidak stasioner dan masalah regresi lancung.

Misalkan terdapat hubungan jangka panjang atau keseimbangan antara dua variabel Y dan X sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t \dots\dots\dots (3.2)$$

Jika Y berbeda pada titik keseimbangan terhadap X maka keseimbangan antara dua variabel X dan Y pada persamaan (3.2) terpenuhi. Namun dalam sistem ekonomi pada umumnya keseimbangan variabel – variabel ekonomi jarang sekali ditemui. Bila Y_t mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai keseimbangannya maka perbedaan sisi kiri dan sisi kanan pada persamaan (3.2) adalah sebesar (Widarjono, 2018):

$$EC_t = Y_t - \beta_0 - \beta_1 X_t \dots\dots\dots (3.3)$$

Nilai perbedaan EC_t ini disebut sebagai kesalahan ketidakseimbangan (*disequilibrium error*). Oleh karena EC_t itu jika sama dengan nol tentunya Y dan X adalah dalam kondisi keseimbangan.

Menurut Engle-Granger (E-G) jika dua variabel Y dan X tidak stasioner tetapi terkointegrasi maka hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan model ECM.

Persamaan (3.20) dapat ditulis kembali menjadi persamaan berikut:

$$\Delta Y_t = a_0 + a_1 \Delta X_t + a_2 EC_t + e_t \dots \dots \dots (3.4)$$

Dimana

$$EC_t = (Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1})$$

Dalam hal ini koefisien α_1 adalah koefisien jangka pendek sedangkan β_1 adalah koefisien jangka panjang. Koefisien koreksi ketidakseimbangan α_2 dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan (Widarjono, 2018).

Model koreksi kesalahan *Engle-Granger* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta PMDN_t = \alpha_0 + \alpha_1 PDB_t + \alpha_2 R_t + \alpha_3 Kurs_t + \alpha_4 PIP_t + \alpha_5 RQ_t + \alpha_6 EC_t + e_t \dots (3.5)$$

$$\text{dimana } EC_t = (\beta_0 + \beta_1 PDB_{t-1} + \beta_2 R_{t-1} + \beta_3 Kurs_{t-1} + \beta_4 PIP_{t-1} + \beta_5 RQ_{t-1} - S_{t-1})$$

Keterangan:

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri

PDB = Produk Domestik Bruto

R = Suku Bunga

KURS = Kurs nominal Rupiah/US\$

PIP = Pengeluaran Investasi Pemerintah

RQ = *Regulatory Quality Index*

B_0, \dots, B_4 = koefisien regresi

EC_t = *error correction term*

e = residual

Δ = perubahan (kelambanan)

a_1, \dots, a_4 = koefisien jangka pendek

a_5 = koefisien penyesuaian

t = periode waktu

4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Uji hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya yaitu uji t-statistik dan uji F-statistik (Gujarati, 2015).

a. Uji t-statistik

Uji t-statistik ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain yang dianggap konstan. Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas, maka harus dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk nilai t-tabel dapat diperoleh dengan melihat tabel distribusi t untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $n-k-1$. Berikut uji t-statistik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendapatan Nasional (PDB)

$H_0 : \beta_1 = 0$ menunjukkan bahwa Pendapatan Nasional (PDB) tidak berpengaruh terhadap PMDN di Indonesia.

$H_a : \beta_1 > 0$ menunjukkan bahwa Pendapatan Nasional (PDB) berpengaruh positif PMDN di Indonesia.

2. Suku Bunga

$H_0 : \beta_2 = 0$ menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap PMDN di Indonesia.

$H_a : \beta_2 > 0$ menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap PMDN di Indonesia.

3. Kurs

$H_0 : \beta_3 = 0$ menunjukkan bahwa kurs tidak berpengaruh terhadap PMDN di Indonesia.

$H_a : \beta_3 > 0$ menunjukkan bahwa kurs berpengaruh positif PMDN di Indonesia.

4. Pengeluaran Investasi Pemerintah

$H_0 : \beta_4 = 0$ menunjukkan bahwa Pengeluaran Investasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap PMDN di Indonesia.

$H_a : \beta_4 > 0$ menunjukkan bahwa Pengeluaran Investasi Pemerintah berpengaruh positif PMDN di Indonesia.

5. *Regulatory Quality Index*

$H_0 : \beta_5 = 0$ menunjukkan bahwa *Regulatory Quality Index* tidak berpengaruh terhadap PMDN di Indonesia.

$H_a : \beta_5 > 0$ menunjukkan bahwa *Regulatory Quality Index* berpengaruh positif terhadap PMDN di Indonesia.

b. Uji F-statistik

Uji F-statistik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, apabila nilai-F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai-F menurut tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi-F dengan cara membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-tabelnya. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$. H_0 diterima (Prob F-statistik signifikan pada $\alpha = 5\%$ atau F-statistik < F-tabel), artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

- H_a : paling tidak satu dari $\beta_k \neq 0$, dimana $k = 1,2,3,4,5$. H_a ditolak (Prob F-statistik tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ atau F-statistik $<$ F-tabel), artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terika

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil estimasi, simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa secara statistik variabel PDB dan *Regulatory Quality Index* berpengaruh positif signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan variabel suku bunga berpengaruh negatif namun tidak signifikan, variabel kurs berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan variabel Pengeluaran Investasi Pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa secara statistik variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Variabel PDB, Kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *Regulatory Quality Index*, berpengaruh positif signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Variabel PDB, suku bunga, kurs, pengeluaran investasi pemerintah dan *Regulatory Quality Index* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan nasional berpengaruh positif signifikan terhadap PMDN sehingga Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang mendorong sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Seperti fokus pada pengembangan sektor industri manufaktur, pariwisata, teknologi informasi, pertanian modern dan energi

terbarukan. Sedangkan kurs berpengaruh positif signifikan terhadap PMDN dalam jangka pendek sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan akses ke pasar global dengan cara mendukung promosi dan branding produk Indonesia, serta memfasilitasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra dagang regional yang akan membuka peluang pasar baru dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pengeluaran investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap PMDN dalam jangka pendek, maka yang dapat dipertimbangkan pemerintah yaitu fokus pada pengembangan infrastruktur yang memadai dan modern. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan memperluas akses pasar serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. *Regulatori Quality index* berpengaruh positif signifikan terhadap PMDN sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan penerapan regulasi dan birokrasi investasi yang mendukung peningkatan PMDN.

2. Suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap PMDN pada jangka pendek sehingga pada jangka pendek Bank sentral dapat mempertimbangkan pelonggaran kebijakan dengan menurunkan suku bunga acuan atau mengurangi persyaratan modal bagi bank-bank komersial.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mencari atau memilih variabel lain supaya lebih menggambarkan dengan jelas faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, Ó., Silva, A., & Silva, P. (2019). Economic growth, foreign direct investment, and national income: A panel data analysis of Portugal. *Journal of International Trade and Economic Development*, 704–722.
- Alkhatib, H. B., Altaieb, G. S., & Alokor, S. M. (2012). ECONOMICAL DETERMINANTS OF DOMESTIC INVESTMENT. *European Scientific Journal*, 8(7), 1–17.
- Amiruddin, H., Afifuddin, S., Syarif, I., & Sirojuzilam. (2003). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Investasi*.
- Anna. (2012). Pengaruh Tingkat Bunga terhadap Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nias Selatan*, 19(2), 195–206.
- Arsyad Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Awad, I. M., Al-Jerashi, G. K., & Alabaddi, Z. A. (2021). Determinants of private domestic investment in Palestine: time series analysis. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 1(1), 71–86. <https://doi.org/10.1108/jbsed-04-2021-0038>
- Bank Indonesia. (2017). *Annual Report 2017*.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan 2020*.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (Limited). Pearson Education.
- Boediono. (2002). *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1* (edisi 2). BPEE.
- Boediono. (2013). *Ekonomi Moneter: Teori, Kebijakan, dan Institusi*. Erlangga.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2012). *Laporan Bulanan Ekspor-Impor Tanaman Pangan dan Perkebunan*.
- Cairncross, A. (1979). *Conditions of Economic Progress*. Routledge.
- Canbaloglu, B., & Gurgun, G. (2017). The Impact of exchange rate uncertainty on domestic investment: Panel Evidence from emerging market and developing

economies. *Intech*. <https://doi.org/DOI: 10.5772/intechopen.71195>

- Chinzara, Z., Dessus, S., & Dreyhaup, S. (2023). Infrastructure In Africa : How Institutional Reforms Can Attract More Private Investment. *International Finance Corporation World Bank Group*.
- Ekananda, M. (2015). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ernita. (2013). Pengaruh Suku Bunga Terhadap Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(1), 52–60.
- Faghih, N., & Akbari, M. (2019). The role of national income in domestic investment in Iran. *International Journal of Social Sciences and Economic Review*, 1(1), 1–8.
- Faridah, hana. (2020). *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN di indonesia tahun 2014-2018*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gujarati, D. N. (2015). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hatano, T. (2010). Crowding-in Effect of Public Investment on Private Investment *. *Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review*, 6(1), 30–42.
- Helmi, R. H. (2014). The effect of real GDP, inflation, fdi, and bussines regulation to domestic investment: a case of the asean 5 in 2003-2012. *Scientific Journal*.
- HS, S., & Sutrisno, B. (2012). *Hukum Investasi di Indonesia*,. PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, M. N., & Wahab, N. A. (2019). Domestic investment and economic growth in Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 1, 75–94.
- Imamudin. (2010). Analisis ekonomi propinsi Gorontalo evaluasi kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 1(1).
- Inimino, E. E., Abuo, M. A., & Bosco, I. E. (2018). Interest Rate and Domestic Private Investment in Nigeria. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 2(10), 198–206. www.rsisinternational.org
- Juliannisa, I. A. (2019). Pengaruh kurs terhadap investasi di Indonesia tahun 1987-2018. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 120–131.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, masalah dan Kebijakan* (Ketiga). UPP AMP YKPN.

- Lewis, W. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labor*. 22, 139–191.
- Makuyana, G., M. O., & Nicholas. (2019). Public and private investment and economic growth in Malawi: an ARDL-bound testing approach. *Economics Research*, 32(1), 673–689.
- Mangkoesubroto, G. (2008). *Ekonomi Makro*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, N. G. (2007). *Teori Makro ekonomi*. Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Mishkin, F. S. (2017). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). Pearson.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Ed. Kedua). PT Raja Grafindo Persada.
- Okechukwu Lheonu, C. (2019). Governance and domestic investment in Africa. *European Journal of Government and Economics*.
- Ouédraogo, R., Sawadogo, H., & Sawadogo, R. (2019). Impact of Public Investment on Private Investment in Sub-Saharan Africa: Crowding In or Crowding Out? *African Development Review*, 31(3), 318–334. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12392>
- Park, S., Kim, J., & Kim, Y. (2019). The Effect of Interest Rate on Domestic Investment: Evidence from Korea. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 5(1), 7.
- Paul Baran. (1957). *The Political Economy of Growth*.
- Pramuditha, I. A., Mukhlis, M., & Wibisino, Y. (2019). Investasi dalam Negeri sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 138–149.
- Prasetyo. (2010). the influence of realization of foreign investment (PMA) and labor force on the economic growth of north sumatra province in 2001-2003. *Journal of Economics*, 1–8.
- Rio, Junaidi, & Mustika, C. (2022). Determinan investasi di Provinsi Jambi: pendekatan error correction model. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol.17(No.3), 655–668.

- Samuel, E., Nurmandi, A., & Hartoyo, H. (2019). The impact of interest rates on investment in Indonesia: Analysis using autoregressive distributed lag approach. *Journal of Economic Policy and Sustainable Development*, 3(2), 90–97.
- Shahzad, S. J. H. (2013). Impact of GDP on Foreign Direct Investment: Evidence from Pakistan. *European Journal of Business and Management*, 5(31), 87–93.
- Silvia, E. D. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Di Sumatera Barat. *Jurnal Imara*, 2(2), 127–137.
- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3).
- Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2005). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyanto, H., & Lidiyawati, M. A. (2021). The impact of domestic investment on economic growth in Indonesia: The role of human capital development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 2, 17–24.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (9th ed.). Erlangga.
- Wahyuni, D. (2004). Perilaku Investasi di Indonesia: Kajian Jangka Pendek dan ...-- Daru Wahyuni. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 2(1), 59–72.
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (ketiga). UPP AMP YKPN.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2021a). *Regulatory Quality Index*. World Bank.
- World Bank. (2021b). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*.